

Pengertian Nasionalisme Menurut Bung Hatta*

H. Rosihan ANWAR

Diskusi panel itu bertema "Pemantapan Pengertian Nasionalisme dan Pembentukan Bangsa dewasa ini demi Penguatan Eksistensi Negara Bangsa." Penyelenggaranya, Yayasan Prasetya Mulya dan Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia. Tujuan diskusi di antaranya ialah memperoleh kejelasan mengenai nasionalisme Indonesia sebagai pancaran dari Pancasila dan UUD 1945; memantapkan peran-serta dunia usaha dalam pembentukan bangsa dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tulisan ini dibuat setelah mendengarkan buah pikiran berharga dari pembicara terkemuka dan setelah menyimak isi makalah-makalah yang disajikan.

KERINDUAN AKAN NASIONALISME

Beberapa kutipan berbunyi sebagai berikut: "Walaupun konsep kebangsaan kita tidak mengenal bentuk-bentuk diskriminasi, tidak mengenal mayoritas-minoritas, tidak dilandasi oleh konotasi etnis, namun berkali-kali kita mengalami sikap serta tindakan yang rasialistis, menumbuhkan perasaan dan pengertian pembedaan antara "pribumi" dan "nonpribumi," antara asing dan asli. Masih lagi semua ini tidak jarang terkait dengan kenyataan, bahwa sebagian besar keturunan Cina itu hidup dari sektor ekonomi. Maka tiupan isu pribumi dan nonpribumi itu langsung saja dikaitkan dengan letupan isu kaya-miskin, walaupun dalam kenyataannya tidak semua keturunan Cina itu adalah kaya dan tidak semua yang lainnya adalah miskin, tidak semua keturunan Cina adalah berekonomi kuat dan tidak semua lainnya itu berekonomi lemah" (kata Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam).

*Karangan ini pernah dimuat dalam harian *Kompas*, 20 November 1984.

”Cita-cita kita bersama adalah sederhana tetapi agung: suatu masyarakat di mana sekalian golongan (kecuali golongan penjahat) dapat hidup rukun, mengembangkan diri tanpa merugikan golongan lain dan bahkan membantu, mendukung golongan-golongan lain, sehingga terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur” (kata Prof.Dr. Harsja W. Bachtiar).

”Dewasa ini terdapat semacam kerinduan akan nasionalisme. Keutuhan dan persatuan bangsa harus kita satukan pengertiannya, dengan lebih terwujudnya rasa senasib dan secita-cita, yang oleh karena itu harus ditumbuhkan melalui peningkatan solidaritas nasional, yang dapat dirasakan gemanya oleh semua orang” (kata Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Sekjen Golkar).

”Pengusaha dan wiraswasta sebenarnya tidak hanya dapat, bahkan seharusnya ikut berperan-serta secara aktif dalam usaha pembentukan bangsa. Mereka harus berusaha membuat ekonomi nasional Indonesia menjadi ’ekonomi pengetahuan’ (*knowledge economy*) melalui pembinaan dunia usaha, yang mereka pimpin dan miliki masing-masing” (kata Dr. Daoed Joesoef).

”Terutama bagi Indonesia yang masih dalam tahapan pembangunan, di mana pemerataan belum dapat dipaksakan oleh aparat pemerintah sepenuhnya secara memadai, dari usahawan dituntut untuk bersadar diri berinisiatif mengembangkan berbagai macam upaya pemerataan menurut kemampuannya masing-masing” (kata Drs. Kwik Kian Gie).

Demikianlah beberapa kutipan untuk memberikan sekedar ide tentang hal yang dipersoalkan. Dalam sanggahan dan diskusi tampil lagi satu baterai pembicara yang pintar-pintar; tidak semua buah pikiran mereka sempat saya catat. Teman-teman sejawat yang berbobot, seperti Jakob Oetama, Fikri Jufri, H. Machbub Djunaidi, tidak ketinggalan angkat bicara. Mendengar nama beberapa sarjana Barat disitir, seperti Ernest Renan, Otto Bauer, Durkheim, Max Weber dan lain sebagainya, sebenarnya saya ingin mengemukakan pandangan seorang putra Indonesia, yaitu Mohammad Hatta, tentang nasionalisme Indonesia.

KE ARAH INDONESIA MERDEKA

Buah pikiran Bung Hatta itu ialah KIM, singkatan dari Kearah Indonesia Merdeka, yang diterbitkannya dalam sebuah brosur tahun 1932, ketika dia memimpin Pendidikan Nasional Indonesia. Meskipun diutarakan lebih dari setengah abad yang silam, namun diletakkan dalam konteks keadaan sekarang, butir-butir pikiran Bung Hatta itu belum kehilangan aktualitas serta relevansinya. Beberapa kutipan adalah sebagai berikut:

”Kebangsaan ada bermacam-macam, menurut rupa dan warna golongan yang memajukannya. Ada kebangsaan ”cap ningrat,” ada kebangsaan ”cap intelek” dan ada pula kebangsaan ”cap rakyat.” Riwayat dunia cukup memberi bukti, bahwa ketiga golongan ini ada senantiasa. ... Akan tetapi bukan kebangsaan ningrat dan bukan pula kebangsaan intelek yang dikehendaki oleh Pendidikan Nasional Indonesia, melainkan kebangsaan rakyat. Karena rakyat itu badan dan jiwa bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendah derajat kita. Dengan rakyat itu kita akan naik dan dengan rakyat itu kita akan turun. ... Kebangsaan itu haruslah dihinggapi semangat rakyat, jadinya berdasar kerakyatan. Asas kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*Recht*, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat, kalau ia beralasan kedaulatan rakyat.”

Menurut Bung Hatta, yang kemudian menjadi salah satu Bapak Pendiri Republik Indonesia: ”Demokrasi Barat yang dilahirkan oleh revolusi Perancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak, harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga. ... Kita tidak akan membawa marabahaya Barat itu (kapitalisme) ke tanah air kita. Sebab kedaulatan rakyat yang kita kemukakan harus berlainan dari keadaannya di Barat, harus bersendi kepada sifat kemasyarakatan (*gemeenschap*), yang menjadi tiang persekutuan kita semenjak zaman purbakala.”

DEMOKRASI POLITIK DAN EKONOMI

”Sungguhpun kedaulatan rakyat yang dimajukan oleh Pendidikan Nasional Indonesia berupa baru, sebenarnya ia tidak asing bagi rakyat Indonesia, karena cita-cita ini tersusun di atas demokrasi tua yang ada di tanah air kita. ... Demokrasi asli yang ada di desa-desa di Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi Perumahan Indonesia Merdeka.

Pertama: Cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang dan tidak luput karena tindisan yang pelbagai rupa. Rapat ialah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarat dan mu-fakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Di sini tampaklah dasar demokrasi, pemerintahan rakyat.

Kedua: Cita-cita massa protes yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinya terhadap pemerintahan despotisme atau autokrasi yang tersusun di atas pundak desa demokrasi. Dan demokrasi tidak dapat berlaku, kalau tak ada hak rakyat untuk mengadakan protes bersama. Dalam hak ini tercantum hak rakyat untuk merdeka bergerak dan merdeka berkumpul.

Ketiga: Cita-cita tolong-menolong. Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas. Kalau seseorang di desa hendak membuat rumah atau mengerjakan sawah ataupun ditimpa bala kematian, maka ia tak perlu membayar tukang atau menggaji seorang kuli untuk menolong dia, melainkan ia ditolong bersama-sama oleh orang-orang desa. Di sini tersimpan dasar perekonomian berkoperasi. ... Inilah sendi tiga dari demokrasi asli di Indonesia.

Jika lingkungan dasarnya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar kerakyatan yang seluas-luasnya, yaitu kedaulatan rakyat seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia. Di atas sendi yang pertama dan yang kedua dapat didirikan tiang-tiang politik dari demokrasi yang sebenarnya: satu pemerintahan negeri yang dilakukan oleh rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya atau badan-badan perwakilan, sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan senantiasa takluk kepada kemauan rakyat.

Untuk menyusun kemauan itu, rakyat mempunyai hak yang tidak boleh dihilangkan atau dibatalkan: hak merdeka bersuara, berserikat dan berkumpul. Di atas sendi yang ketiga dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang-orang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan."

Bung Hatta mengemukakan buah pikirannya tadi 52 tahun yang lalu. Para pengusaha dan wiraswasta yang ikut sebagai peserta diskusi panel itu, barangkali menganggap pikiran-pikiran Bung Hatta itu sudah ketinggalan zaman. Juga barangkali ada peserta yang menilai, pikiran Bung Hatta tidak pada tempatnya lagi dalam suatu *bureaucratic state* atau *beamtenstaat*. Tetapi mengingat sasaran diskusi panel adalah "mendapatkan pengertian yang jelas tentang konsep nasionalisme dan negara bangsa Indonesia serta peranan dunia usaha dan kewiraswastaan dalam usaha mewujudkan cita-cita negara dan bangsa," saya rasa tidak salah menaruh buah pikiran Bung Hatta sebagai bahan perbandingan dan pelengkap di hadapan para peserta diskusi dalam rangka menyambut peringatan 56 tahun Sumpah Pemuda.